

BUDAYA KEMISKINAN DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

CULTURE OF POVERTY IN POVERTY REDUCTION IN INDONESIA

Johan Arifin

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Gd. Cawang Kencana Lt. 2, Jl. Mayjen Sutoyo, Kav. 22 Cawang, Jakarta Timur, Indonesia
E-mail: masjohan81@gmail.com

Abstrak

Penanggulangan kemiskinan menjadi sasaran utama program pembangunan sesuai dengan pengarusutamaan agenda MDGs dan SDGs dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Program penanggulangan kemiskinan yang digulirkan pemerintah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan, meskipun secara nominal jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan yang pernah dan sedang dijalankan masih menghadapi berbagai tantangan dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Pada satu sisi pembangunan selama ini belum bisa “membebaskan” si miskin karena faktor budaya yang membelenggu. Pada sisi lain budaya kemiskinan menjadi pelampiasan masyarakat miskin yang tidak berdaya menghadapi cengkraman kapitalisme. Karakter khas kemiskinan masyarakat Indonesia menghendaki pendekatan struktural dan kultural secara seimbang. Nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang mendorong pada perubahan pola pikir menanggulangi kemiskinan perlu diangkat dalam program kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan lebih dulu memaknai ulang nilai-nilai budaya tersebut. Perlu diciptakan “budaya tanding”, yaitu memunculkan sebagian dari populasi suatu masyarakat yang secara kuat menganut atau memeluk satu atau lebih nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang dominan. Kajian ini menjelaskan secara kualitatif deskriptif hambatan kultural dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Analisis didukung oleh data dan informasi sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan.

Kata Kunci: penanggulangan kemiskinan, pembangunan, budaya kemiskinan, memaknai ulang, budaya tanding.

Abstract

Poverty reduction is the main target of development programs in accordance with the mainstreaming of the MDGs and SDGs agenda in the National Long-Term Development Plan (RPJPN 2005-2025). The poverty reduction program initiated by the government has succeeded in reducing the percentage of the poverty rate, even though nominally the number of poor people is still quite high. Poverty reduction efforts that have been and are being carried out are still facing various challenges in the cultural values of the Indonesian people. On the one hand, development so far has not been able to "free" the poor because of cultural factors that shackle them. On the other hand, a culture of poverty becomes an outlet for the poor who are powerless to face the grip of capitalism. The characteristic character of poverty in Indonesian society demands a balanced structural and cultural approach. Cultural values in society that lead to a change in mindset to alleviate poverty need to be raised in poverty reduction policy programs by first re-interpreting these cultural values. It is necessary to create a "counter culture", which is to create a part of the population of a society that strongly adheres to or embraces one or more cultural values that are different from the values that exist in the dominant culture. This study describes qualitatively descriptive cultural barriers in poverty reduction in Indonesia. The analysis is supported by secondary data and information obtained from various relevant literatures.

Keywords: poverty reduction, development, culture of poverty, redefine, counterculture.

PENDAHULUAN

Menurunkan angka kemiskinan adalah agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Hal ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Milenium, deklarasi yang diadopsi 189 negara, lahir dari kesepakatan 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Millenium di New York, September 2000. Deklarasi ini diberi tajuk “Tujuan Pembangunan Millenium” (*Millenium Development Goals – MDGs*), yang terdiri dari 8 tujuan: (1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan ekstrim; (2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua; (3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (4) Menurunkan angka kematian anak; (5) Meningkatkan kesehatan ibu hamil; (6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (7) Memastikan kelestarian lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Delapan tujuan itu diukur dengan target kualitatif dan kuantitatif, dengan rentang waktu perhitungan mulai tahun 1990 dan diharapkan tercapai pada tahun 2015 (BPS dan UNICEF, 2009).

Secara keseluruhan, hingga tahun 2015 pencapaian MDGs di Indonesia adalah 71 persen, di mana dari total 72 indikator, 51 indikator berhasil tercapai. Tujuan MDGs ketiga dan keempat semua indikatornya berhasil dicapai, dengan masing-masing sebanyak tujuh dan empat indikator. Sementara sasaran MDGs yang indikatornya paling banyak belum tercapai adalah kesatu dan ketujuh yakni masing-masing sebanyak tujuh dan enam indikator (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Pada 21 Oktober 2015 dideklarasikan *SDG's (Sustainable Development Goals)* sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030. Disepakati dan diadopsi oleh 193

negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). *SDGs* melanjutkan agenda *MDGs*, disertai pengembangan menjadi 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Perluasan cakupan agenda ini diharapkan mampu untuk lebih tanggap atas penyebab utama kemiskinan serta kebutuhan universal. Tujuan *SDGs* mencakup tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. Pendekatan *SDGs* ini memperkuat pencapaian sasaran agenda *MDGs*, tertuju pada sasaran akhir mengentaskan kemiskinan di tahun 2030 dengan semangat “*no one left behind*” (Alisjahbana dan Murniningtyas, 2018).

Penanggulangan kemiskinan di Indonesia dinilai cukup berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga berada pada angka 9 - 11 persen. Angka kemiskinan tercatat 10,12 persen pada September 2017, pada periode yang sama turun menjadi 9,82 persen pada 2018, kembali turun menjadi 9,41 persen pada 2019, namun mengalami lonjakan ke angka 9,78 persen pada Maret 2020 (BPS, 2020). Periode Semester 1 2020 menjadi semacam anomali, ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia yang mengakibatkan lonjakan angka kemiskinan, di mana banyak penduduk pada posisi rentan miskin yang kembali jatuh miskin. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut hingga 1-2 tahun mendatang karena resesi ekonomi telah memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga menambah beban pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

Selama tiga tahun terakhir dalam kondisi sebelum pandemi, jika dicermati lebih jauh, jumlah penduduk miskin secara nominal tidak jauh mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kemiskinan pada September 2019 sebesar 0,19 persen dibandingkan dengan Maret

2019 dan menurun 0,44 persen terhadap September 2018 belum menggambarkan kesuksesan penanggulangan kemiskinan. Menurut ekonom senior INDEF, Enny Sri Hartati, penurunan ini hanya mencerminkan turunnya kemiskinan absolut. Penurunan itu belum sebanding dengan anggaran program penanggulangan kemiskinan yang lebih dari Rp100 triliun (ekonomi.bisnis.com, 2020).

Diperlukan kajian lebih mendalam, bahwa meskipun telah banyak program dan kebijakan digulirkan (strategi struktural) dengan dukungan anggaran yang tidak sedikit, penanggulangan kemiskinan masih belum berjalan dengan hasil yang optimal. Wajah kemiskinan yang dipengaruhi oleh banyak faktor (multidimensional), sangat dimungkinkan karena sebab-sebab kultural (strategi budaya) masih menjadi salah satu bagian dari hambatan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan selama ini berpijak pada konsep kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi “penduduk miskin” adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan (BPS, 2020). Dari konsep ini maka konsekuensinya adalah penanggulangan kemiskinan dominan menggunakan skema peningkatan pendapatan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Dengan demikian, ukuran-ukuran dimensi ekonomi adalah prioritas utama dan tujuan penanggulangan kemiskinan itu sendiri, dibandingkan dimensi lain, misalnya faktor budaya.

Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan selama ini dinilai masih banyak kekurangan, diantaranya: pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek lain kemiskinan multidimensional; kedua, lebih bernuansa karitatif (bantuan sosial) daripada produktivitas; ketiga, lebih memposisikan masyarakat miskin sebagai obyek daripada subyek; keempat, pemerintah masih sebagai penguasa (program terpusat yang seragam, *top-down*) daripada fasilitator. Wajah kemiskinan yang multidimensional memerlukan pendekatan yang seimbang antara ekonomi dan non ekonomi. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun perlu juga mengatasi kemiskinan dari faktor non-ekonomi. Strategi pengentasan kemiskinan perlu diarahkan pada mengikis nilai-nilai budaya yang negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, merasa tidak berdaya, dan lain-lain (Huraerah, 2005).

Penanggulangan kemiskinan memerlukan kajian yang mendalam dan akurat untuk merumuskan strategi terbaik, yang diawali dengan mengenali secara mendalam karakter dasar masyarakat dan penyebab kemiskinan itu sendiri. Penyamaan persepsi yang tepat tentang konsep, indikator serta target prioritas penanggulangan kemiskinan, menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.

Kajian-kajian tentang penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan, di antaranya banyak menjelaskan sebab-sebab kemiskinan dari sudut pandang struktural. Pembangunan ekonomi yang tidak adil membawa dampak pada kemiskinan dan kesenjangan yang parah, di mana kebijakan pemerintah tidak berpihak pada si miskin (Syawie, 2011). Hal ini erat kaitannya dengan sebagian besar program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang tidak begitu berhasil karena terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dari rencana mereka (Prawoto, 2009). Sementara pemberdayaan

masyarakat miskin dirasakan belum berjalan dengan baik untuk mengentaskan masyarakat miskin karena desain program yang kurang tajam (Sutikno et al, 2015).

Kajian-kajian yang membahas tentang hambatan-hambatan budaya dalam penanggulangan kemiskinan belum banyak dilakukan. Padahal, faktor kultural (budaya) memiliki andil yang relatif seimbang dengan faktor struktural sebagai penyebab kemiskinan di Indonesia. Kajian tentang budaya kemiskinan menjadi penting dilakukan mengingat program anti kemiskinan akan lebih efektif digulirkan jika sejalan dengan budaya yang eksis di masyarakat melalui pendayagunaan potensi, sumberdaya dan budaya lokal (Royat, 2007).

Budaya secara umum bisa dilihat sebagai ciptaan manusia yang berkembang dan dimiliki suatu kelompok masyarakat, kemudian dikembangkan menjadi suatu kebiasaan aktifitas turun-temurun. Kebudayaan dimaknai sebagai suatu sistem simbolik atau sistem perlambangan (Kaplan, 2012). Sutrisno (2005) menguraikan budaya dalam berbagai sudut, yaitu: (1) secara deskriptif adalah totalitas komprehensif yang menyusun keseluruhan hidup manusia; (2) secara historis adalah warisan yang turun-temurun; (3) secara normatif adalah aturan hidup dan gugus nilai; (4) secara psikologis adalah piranti pemecahan masalah yang membuat orang bisa hidup dan berinteraksi; (5) secara struktural adalah abstraksi yang berbeda dari perilaku konkret; dan (6) budaya lahir dari interaksi antar manusia dan terwariskan kepada generasi berikutnya.

Sementara menurut Daoed Joesoef budaya adalah sistem nilai yang dihayati, dan segala sesuatu yang mencirikan budaya adalah kebudayaan. Nilai itu meliputi: (1) sesuatu yang berbentuk atau berwujud dan dapat disentuh seperti bangunan, karya seni, dan lain-lain; (2) sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak dapat

disentuh seperti adat-istiadat, tradisi, kebiasaan normatif, moral, etika, gagasan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain (Joesoef, 1996).

Warisan kebudayaan secara turun-temurun dijadikan oleh kelompok masyarakat sebagai pegangan hidup dan kebiasaan kelompok masyarakat. Demikian halnya yang dirumuskan Oscar Lewis dengan mengamati perilaku masyarakat miskin dan budayanya. Budaya kemiskinan dalam pandangan Oscar Lewis mencakup apa yang diyakini (nilai-nilai), respons dalam tindakan (sikap), dan abstraksi-abstraksi dari kelakuan (pola-pola kelakuan) yang berlangsung terus-menerus. Lewis mengidentifikasi budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistis berciri kapitalistik, yang kemungkinan besar dimiliki oleh kelompok masyarakat yang berstrata rendah dan mengalami perubahan sosial yang drastis (Lewis, 1959). Perilaku yang mencirikan budaya kemiskinan ini dijalankan secara turun-temurun antar generasi, sehingga menghambat suatu kelompok dalam masyarakat tertentu untuk keluar dari garis kemiskinan.

Wujud budaya kemiskinan misalnya terdapat pada masyarakat pemulung di kawasan perkotaan. Terdapat wujud budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi di perkampungan kumuh, antara lain ketergantungan dengan tengkulak/pengepul, singkatnya masa anak-anak, rendahnya partisipasi dan integrasi pada pranata masyarakat (Wahyudi dan Handoyo, 2014).

Tulisan ini merupakan kajian dengan pendekatan deskriptif kualitatif tentang budaya kemiskinan. Teori Oscar Lewis tentang *Culture of Poverty* ditampilkan sebagai konsep awal untuk melihat eksistensi budaya kemiskinan di Indonesia. Lewis memahami budaya

kemiskinan sebagai suatu sub-kebudayaan yang diwarisi dari generasi ke generasi. Menurut Lewis (1959) kemiskinan bukan hanya masalah kelumpuhan ekonomi, disorganisasi atau kelangkaan sumber daya. Budaya kemiskinan dalam beberapa hal bersifat positif karena memberikan jalan keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya.

Kajian ini bertujuan untuk mendiskripsikan beberapa nilai-nilai budaya dalam masyarakat perkotaan yang menjadi tantangan penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari hasil penelusuran literatur dan dokumentasi sumber-sumber lain yang relevan. Penelusuran literatur dilakukan berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Pada metode penelusuran literatur, penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian tapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan itu untuk memperoleh data penelitian (Zed, 2014). Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Kemiskinan: Beberapa Konsep Kunci

Kemiskinan telah menjadi kajian menarik seiring perkembangan ilmu-ilmu sosial. Laju industrialisasi dan berkembangnya berbagai konsep pembangunan ekonomi mendorong berbagai kajian sosial utamanya tentang dampaknya terhadap bertambahnya penduduk miskin. Studi tentang kemiskinan di Indonesia mendapatkan momentum terbaiknya dengan gencarnya pemerintah Orde Baru melakukan pembangunan di segala bidang termasuk di dalamnya upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa ahli ilmu sosial di Indonesia mengemukakan tentang konsep kemiskinan.

Suparlan (1984) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan kekurangan harta atau benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok orang. Akibat dari kekurangan harta atau benda tersebut maka seseorang atau sekelompok orang itu merasa kurang mampu membiayai kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan layak. Ketidakmampuan tersebut bisa jadi hanya pada tingkat kebutuhan-kebutuhan budaya (adat, upacara-upacara, moral dan etika), atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial (pendidikan, berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama) atau pada tingkat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar (makan-minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan). Dengan demikian, kemiskinan merupakan kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang menjadi syarat kesejahteraan individu.

Pandangan lain tentang kemiskinan disampaikan oleh Gunawan Sumodiningrat yang merumuskan tentang profil kemiskinan (Sumodiningrat et al., 1999). Ia menggarisbawahi bahwa timbulnya kemiskinan bukan saja masalah kesejahteraan (*welfare*), akan tetapi memuat berbagai sisi bahasan, yaitu: pertama, masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan (*vulnerability*). Misalnya adalah pembangunan bidang pertanian yang telah mampu meningkatkan pendapatan petani cukup signifikan, meskipun seandainya jika terjadi musim kering berturut-turut dalam beberapa tahun, maka tingkat kesejahteraan petani akan anjlok sampai titik yang terendah. Faktor alam dalam contoh ini menjadi penyumbang kerentanan nasib petani.

Kedua, kemiskinan berarti tertutupnya akses pada kesempatan-kesempatan kerja. Hal ini akibat dari hubungan produksi dalam masyarakat yang tidak memberikan kesempatan akses untuk berpartisipasi dalam aktivitas produksi, atau sekalipun mereka bekerja tetapi mereka terjebak dalam hubungan produksi yang

eksploitatif, yang menuntut kerja keras dalam jam kerja yang panjang dengan imbalan yang rendah dan tidak layak.

Ketiga, kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para birokrat dalam menentukan keputusan yang menyangkut dirinya tanpa memberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan ketidakberdayaan menghadapi penyakit, kematian, kekumuhan, dan kekotoran.

Keempat, kemiskinan berarti menghabiskan semua atau sebagian besar penghasilan golongan miskin untuk konsumsi pangan dengan kuantitas dan kualitas yang terbatas, sehingga konsumsi gizi mereka amat rendah yang mengakibatkan produktifitas dan etos kerja mereka rendah pula. Di samping itu juga akan menghasilkan ketahanan fisik yang juga rendah.

Kelima, kemiskinan ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan, karena banyaknya anggota keluarga dan beberapa diantaranya masih balita atau bahkan lansia. Hal ini akan berpengaruh pada rendahnya konsumsi yang akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka, sehingga dalam kompetisi merebut peluang dan kesempatan di masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak yang lemah.

Keenam, kemiskinan terefleksikan dalam budaya kemiskinan, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penghapusan *physical poverty* (kemiskinan yang kasat mata: sandang, pangan, papan, sarana dan pra-sarana lingkungan, dan lain-lain) tidak secara otomatis akan menghapuskan *culture of poverty* (budaya kemiskinan: sikap mental, etos kerja, tingkat pendidikan, dan lain-lain). Budaya kemiskinan yang terwariskan secara turun temurun antar generasi ini cenderung menghambat motivasi untuk melakukan mobilitas ke atas. Itu berarti

menghambat kemajuan dan harapan-harapan mereka di masa depan.

Mubyarto (1995) memberikan definisi kemiskinan adalah suatu situasi serba kekurangan dari penduduk yang terwujud dalam bentuk rendahnya pendapatan dan disebabkan oleh rendahnya ketrampilan, produktivitas, lemahnya nilai tukar produksi dan terbatasnya kesempatan berperan serta dalam pembangunan. Rendahnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan rendahnya produktivitas dan meningkatkan beban ketergantungan bagi masyarakat.

Menurut Sajogyo (dalam Suyanto, 2013), kemiskinan bisa diukur dengan membuat suatu batasan atau klasifikasi kemiskinan, yakni: (1) Perkotaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 420 kilogram per tahunnya; (2) Perdesaan, seseorang disebut miskin apabila mengkonsumsi beras 320 kilogram per tahun, miskin sekali 240 kilogram per tahun dan paling miskin apabila mengkonsumsi beras kurang dari 180 kilogram per tahunnya. Pengeluaran makanan merupakan fungsi dari Pendapatan, dimana Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan dalam standar ukuran kemiskinan secara global, yakni kemiskinan merupakan perihal keadaan kekurangan dengan pendapatan minimum US\$1 per orang per hari (Albornoz, 2007).

Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan definisi kemiskinan untuk standar di Indonesia sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rupiah per kapita per bulan. Di sisi yang lain, Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) sebagai tolok ukur definisi kemiskinan diterjemahkan sebagai kondisi kekurangan kebutuhan hidup (makanan, minuman, pakaian, rumah) selama satu bulan berdasarkan jumlah kalori, protein, vitamin dan bahan mineral lainnya yang diperlukan untuk hidup layak seorang pekerja. Kebutuhan

konsumsi harus memenuhi 2100 kalori per hari (kelompok makanan) ditambah dengan kebutuhan (bukan makanan) minimal lainnya yang mencakup perumahan, pakaian, kesehatan dan pendidikan (BPS, 2008).

Kemiskinan dan Pembangunan

Pembangunan ekonomi di samping sebagai salah satu upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, juga dianggap sebagai salah satu yang membawa eksese negatif yakni munculnya kemiskinan. Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam buku “Kemiskinan di Indonesia” menghimpun sejumlah hasil penelitian kependudukan dan masalah kemiskinan (Jakti, 1986). Ia melihat masalah kemiskinan muncul sebagai dampak dari kebijakan pembangunan khususnya pembangunan desa-kota yang tidak seimbang, sehingga berdampak pada berkembangnya fenomena kemiskinan. Pembangunan perkotaan yang didukung oleh industrialisasi yang masif telah melahirkan sebuah dorongan masyarakat desa untuk berurbanisasi dan beralih profesi menjadi buruh-buruh di sektor industri perkotaan. Pada sisi lain sektor pertanian di desa yang kekurangan tenaga kerja membawa dampak negatif pada menurunnya ketahanan pangan yang secara alami ditopang oleh produksi di pedesaan.

Fenomena semacam ini menjadi karakter khas dari negara-negara dunia ketiga yang mengalami periode transisi modernisasi yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat industri baru. Namun, hadirnya industri justru merusak akar fundamental ekonomi utamanya di pedesaan yang berkarakter agraris beralih menjadi berorientasi kerja sebagai buruh pada pabrik-pabrik di perkotaan karena dianggap lebih menjanjikan dan bercitarasa modern.

Pembangunan yang justru menyebabkan semakin melebarnya kesenjangan menjadi sebuah kritik tajam pada dekade 1970-an.

Mahbub ul Haq dalam bukunya *Poverty Curtain*, 1976 (alih bahasa: “Tirai Kemiskinan, Tantangan Pembangunan untuk Dunia Ketiga”: 1983), menyajikan gambaran kondisi ini dalam bukunya dengan serangkaian kalimat:

“Tirai kemiskinan telah turun di muka bumi, membelahnya, dari segi kebendaan dan pandangan hidup, menjadi dunia berbeda, dua planet terpisah, dua kelompok manusia tidak sederajat, yang satu teramat kaya, yang lain sangat melarat. Batas yang tidak terlihat oleh pandangan mata ini, kita jumpai dalam Negara dan antar Negara”.

Kemiskinan sebagai eksese negatif dari pembangunan selama ini adalah karena ulah para perencana pembangunan dunia itu sendiri. Pembangunan di berbagai negara menyebabkan terbangunnya tirai kemiskinan, membuat para perencana pembangunan menjadi seperti dewa moral dunia yang memberi arah pada dunia baru. Tata dunia baru internasional hasil pembangunan mengandaikan pola hubungan interaksi antar negara dalam melakukan pemenuhan hajat hidup masing-masing berlangsung dengan penuh keadilan (ul Haq, 1976).

Jalannya pembangunan yang membawa eksese pada ketimpangan ini memerlukan revisi yang mendasar secara konseptual. Mahbub ul Haq mengemukakan pandangan baru dengan mengajukan delapan ide mendasar terhadap pola pembangunan utamanya untuk mengangkat derajat si miskin, yakni: *Pertama*, pembangunan dengan berfokus pada pertumbuhan *Gross National Product* (GDP) seringkali tidak sampai ke masyarakat bawah. Yang lebih dibutuhkan adalah penanganan langsung atas kemiskinan dan orang miskin itu sendiri. *Kedua*, mekanisme pasar seringkali mengalami kesenjangan akibat pembagian pendapatan dan kekayaan yang berlaku secara tidak adil, padahal pasar bukanlah pemberi arah yang dapat diandalkan untuk menentukan tujuan-tujuan nasional suatu bangsa. *Ketiga*, model pembangunan harus lebih

manusiawi, sehingga bukan manusia yang semata-mata menjadi obyek pembangunan tetapi pembangunanlah yang harus diarahkan untuk melibatkan dan mensejahterakan sebanyak mungkin manusia di dalamnya. *Keempat*, perubahan kelembagaan lebih menentukan daripada sekedar perubahan standar harga kebutuhan pokok manusia untuk menyusun strategi pembangunan yang lebih tepat. *Kelima*, model baru pembangunan harus berpijak pada tujuan memuaskan kebutuhan pokok manusia dan bukan mengutamakan permintaan pasar semata. *Keenam*, kebijakan tentang pembagian dan penyediaan lapangan kerja harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap rencana produksi, bukan mendahulukan produksi terlebih dahulu kemudian baru membaginya. *Ketujuh*, menaikkan produktivitas orang-orang miskin dengan mengarahkan penanaman modal ke sektor-sektor pro-miskin dalam masyarakat. *Kedelapan*, hubungan kekuasaan politik dan ekonomi umumnya harus dirombak dan disusun kembali agar pembangunan dapat lebih tersebar luas di masyarakat (ul Haq, 1976).

Lontaran pemikiran Mahbub ul Hag empat dekade silam ini ternyata masih relevan hingga saat ini, yaitu pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan pembangunan. Strategi pembangunan dewasa ini diarahkan untuk “membangun manusia seutuhnya” selaras dengan tujuan utama *Millennium Development Goals (MDGs)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni mengentaskan sebanyak mungkin masyarakat miskin dari jurang kemiskinan ekstrim.

Kritik ul Haq tersebut sejalan dengan Amartya Sen memberikan pandangan bahwa pembangunan semestinya berfokus pada memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kebebasan manusia. Peningkatan pendapatan (*income*) sebagai salah satu parameter, hanya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi

peningkatan kesejahteraan dan kebebasan. Pertumbuhan ekonomi dengan demikian tidaklah menjadi dasar yang kuat untuk mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Karena bagaimanapun pembangunan merupakan upaya perluasan kemampuan rakyat (*expansion of people's capability*) dan lebih jauh lagi pembangunan merupakan pembebasan (*development as freedom*) (Sen, 1999).

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bersifat instrumental (*instrumental freedoms*) meliputi: (1) Kebebasan Politik (*Political Freedoms*); (2) Fasilitas Ekonomi (*Economic Facilities*); (3) Peluang Sosial (*Social Opportunities*); (4) Jaminan Transparansi (*Transparency Guarantees*); (5) Keamanan Protektif (*Protective Security*).

Rumusan Sen mengarah pada pentingnya mengutamakan pencapaian peningkatan kesejahteraan sosial dan penghormatan atas hak asasi manusia dalam praktik-praktik pembangunan. Rumusan ini memberikan kontribusi mendasar dalam konsep “*welfare economics*” dan mengembangkan pemikiran keberpihakan pada sisi kemanusiaan dalam mengatasi problem-problem ekonomi untuk memajukan kesejahteraan sosial. Pengingkaran atas hak asasi manusia menjadi kendala dalam pembangunan manusia, karena sebetulnya jaminan akan hak asasi manusia dapat mengurangi resiko bencana sosial ekonomi. Hal ini dapat berjalan dengan baik manakala masyarakat memiliki sarana atau akses untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh kesempatan yang luas untuk mendapatkan informasi dan pengajaran sehingga bisa membuka wawasan dan kesadaran akan hak-hak mereka.

Kemiskinan: Antara Penyebab Struktural dan Kultural

Kemiskinan dilihat dari penyebabnya, secara umum dibedakan menjadi dua yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Keduanya bisa ditemui dan menemukan porsi yang seimbang dalam kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Pada awal era Orde Baru yang memfokuskan agenda pada pembangunan ekonomi, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIS), 13-17 November 1979 di Malang, melakukan sebuah kajian ilmiah melalui sebuah seminar mengusung tema besar pembangunan sosial ekonomi. Hasil kajian ini disebut-sebut menjadi salah satu rumusan penting tentang “Kemiskinan Struktural”.

Hasil kajian tentang kemiskinan struktural tersebut selaras dengan rumusan Sosiolog terkemuka Indonesia, Selo Soemardjan yang berpendapat bahwa kemiskinan struktural terjadi pada individu miskin bukan karena malas bekerja atau tidak berpenghasilan, tetapi lebih disebabkan struktur sosial masyarakat yang ada membatasi hak-hak mereka untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang tersedia untuk mereka (Soemardjan, 1980). Kelompok masyarakat pada kondisi seperti itu umumnya sadar bahwa nasibnya berbeda dengan golongan masyarakat lain. Menurut Soemardjan, masuk dalam golongan ini para petani yang tidak punya lahan atau lahan garapannya terlalu kecil, sehingga seberapa giatpun mereka bekerja, penghasilannya tidak akan mencukupi. Termasuk juga dalam golongan ini para pekerja yang tidak terdidik dan terlatih (*unskilled labores*) yang menghambat mereka memasuki pasar kerja. Pengusaha bermodal kecil dan tanpa fasilitas dari pemerintah (sering disebut kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah –

UMKM) sebagian di antaranya juga masuk golongan ini.

Patut diakui perjalanan penanggulangan kemiskinan masih menghadapi banyak tantangan baik struktural maupun kultural. Di satu sisi struktur masyarakat dan pola penguasaan sumber-sumber ekonomi yang tidak merata menjadi hambatan struktural sehingga memicu kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Pada sisi lain kemiskinan kultural menjadi kenyataan yang masih berkembang dan tanpa disadari melembaga dalam masyarakat Indonesia.

Masalah kemiskinan dalam sudut pandang kultural (budaya) bukan hanya terkait dengan masalah kelangkaan sumber-sumber ekonomi, ketidakadilan distribusi sarana produksi, atau dominasi akses modal finansial oleh golongan tertentu saja. Di samping kendala struktural, masalah kemiskinan menyangkut sikap mental, pola perilaku, dan pilihan sikap yang berasal dari *state of mind* (pola pikir dan sikap mental) yang tak mampu berjalan beriringan dengan semangat perubahan, kemajuan, dan peningkatan status serta kualitas kehidupan. Kajian antropologi pembangunan memunculkan sebuah ungkapan: “*poverty is a state of willingness rather than scarcity*” (kemiskinan lebih pada masalah kemauan daripada kelangkaan sumber daya).

Salah satu tantangan paling berat dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah mengubah budaya masyarakat yang lekat dengan kemiskinan, atau Oscar Lewis menyebutnya sebagai *Culture of Poverty* (budaya kemiskinan). Lewis memberi penegasan tentang budaya kemiskinan (Suparlan, 1984): “*Lebih mudah menghapuskan kemiskinan daripada budaya kemiskinan.*”

Menurut Lewis, *Culture of Poverty* bisa dimaknai sebagai suatu sub-kebudayaan hasil adaptasi dan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dimana

kebudayaan tersebut cenderung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi. Kebudayaan tersebut mencerminkan upaya mengatasi keputusan dari keinginan untuk sukses di dalam kehidupan sesuai dengan nilai dan tujuan masyarakat yang lebih luas. Ia berpandangan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kelumpuhan ekonomi, disorganisasi atau kelangkaan sumber daya, melainkan muncul sebagai sikap mental yang kurang mampu mengikuti perubahan.

Kebudayaan ini terdapat pada mereka yang berasal dari strata sosial paling rendah, sedang mengalami perubahan pesat dan yang telah terasing dari masyarakat tersebut. Adapun ciri-ciri budaya ini (Lewis, 1959) adalah: (1) Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat. Mereka umumnya berprestasi rendah namun mengakui nilai-nilai kelas menengah ada pada diri mereka. Mereka sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan status namun tidak memiliki kesadaran kelas; (2) Di tingkat komunitas, dapat ditemui rumah-rumah bobrok, penuh sesak, bergerombol dan rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti; (3) Di tingkat keluarga, ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua, cepat dewasa, hidup bersama/ kawin bersyarat, tingginya jumlah perpisahan antara ibu dan anaknya, cenderung matrilineal dan otoritarianisme, kurangnya hak-hak pribadi, solidaritas semu; (4) Di tingkat individu, ditandai dengan kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan dan rendah diri (*fatalisme*).

Meskipun demikian, dalam beberapa hal budaya kemiskinan justru bisa bersifat positif karena menjadi jalan keluar bagi kaum miskin untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya. Budaya kemiskinan merupakan adaptasi atau penyesuaian dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan

marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualistik, dan berciri kapitalistik. Sebagian masyarakat yang tergolong miskin konsisten pada nilai-nilai tradisional dan menolak modernisasi untuk melindungi komunitasnya dari penetrasi kapitalisme.

Beberapa suku tradisional di Indonesia bisa menjadi contoh, misalnya Suku Badui Dalam di Banten, komunitas Samin di Jawa Tengah bagian utara, dan Suku Anak Dalam di Sumatera. Konsistensi beberapa komunitas ini untuk tetap hidup secara *subsisten* (hanya memenuhi kebutuhan sendiri) dan menolak industrialisasi merupakan suatu pilihan sikap secara sadar. Mempertahankan adat istiadat dan kelestarian lingkungan sementara ini masih menjadi alasan yang paling kuat. Pilihan tindakan semacam ini di satu sisi merupakan pilihan paling rasional di tengah keterbatasan pengetahuan dan sumberdaya manusia pada masa lalu. Namun di sisi lain, perkembangan zaman tidaklah mungkin dibendung dan pilihan berikutnya adalah menyesuaikan diri atau tergilas oleh laju zaman itu sendiri.

Masyarakat modern kerap kali menyebut tindakan ini sebagai wujud budaya kemiskinan karena penolakan terhadap modernisasi dan memilih untuk tetap “miskin”. Perspektif manusia modern mensyaratkan masyarakat yang maju haruslah mengadopsi teknologi mutakhir yang tercermin dari pola mekanisasi industri barang dan jasa. Dalam konteks ini kebudayaan kemiskinan bisa dimaknai sebagai: (1) Penolakan terhadap kapitalisme; Budaya kemiskinan sebagai bentuk ketidakberdayaan menghadapi kekuatan ekonomi kapitalisme yang telah mengeksploitasi kehidupan sekelompok orang; (2) Sebagai proses adaptasi; Kemiskinan sebagai proses adaptasi keluarga miskin karena perubahan sistem ekonomi dari tradisional ke kapitalisme dalam memenuhi kebutuhannya; (3) Sebagai sub budaya sendiri;

Kemiskinan yang diakibatkan oleh faktor dari dalam diri individu sendiri dan kelompok miskin, misalnya; malas, fatalisme, rendah diri, ketergantungan dan lainnya (Lewis, 1959).

Lewis menambahkan, wujud *Culture of Poverty* dapat ditemukan dalam beberapa karakter kondisi masyarakat seperti: sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi berorientasi keuntungan (*profit oriented*); tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tinggi; upah buruh rendah yang tak lebih sekedar cukup untuk bertahan hidup; tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah mendayagunakan organisasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; sistem keluarga bilateral yang lebih menonjol; kuatnya seperangkat nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan kekayaan disertai anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidaksanggupan pribadi (kemalasan).

Pemaknaan atas budaya kemiskinan di Indonesia pada era sekarang ini berkaitan erat dengan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pemberian berbagai program bantuan sosial yang bersifat *charity* sesungguhnya benar-benar ditujukan bagi orang miskin agar terpenuhi hak-hak dasarnya dan menjadi lebih berdaya lepas dari budaya kemiskinan yang membelenggu mereka. Namun, pilihan kebijakan penanggulangan kemiskinan semacam ini ternyata memunculkan fenomena baru tentang budaya kemiskinan. Sugeng Harianto (2015) dalam sebuah penelitian di Jawa Timur menemukan fakta menarik tentang budaya kemiskinan. Program-program anti kemiskinan selama ini selain tidak efektif menurunkan jumlah orang miskin, justru memunculkan kemiskinan baru dengan adanya fenomena kalangan tertentu yang “memiskinkan diri”. Sebagian kalangan masyarakat seolah-olah berpura-pura miskin agar mendapatkan

bantuan pemerintah. Kebiasaan ini membudaya dan menjadi suatu bentuk pilihan adaptasi yang rasional dalam upaya mengatasi kemiskinan. Namun, sesungguhnya di balik itu, sikap ini merupakan bentuk kecemburuan sosial ketika merespon program-program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah yang bersifat karitatif dan langsung. Bahkan respon ini juga dikaitkan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara (Harianto, 2015).

Pendapat lain tentang budaya kemiskinan dikemukakan oleh Mudjahirin Thohir bahwa budaya kemiskinan terkait dengan pemahaman keagamaan yang keliru, yaitu cara pandang *jabariyah*, di mana keberadaan nasib diri seseorang (jatuh miskin) dimaknai sebagai takdir Tuhan, bukan disebabkan oleh usaha yang kurang optimal dalam mengusahakan penghidupan sehari-hari (Thohir, 2005). Dari sisi sosial, orang dengan pemahaman seperti ini menjustifikasi dirinya sebagai orang yang memang digariskan dengan rejeki yang hanya sebesar itu. Dalam ungkapan budaya Jawa dikenal dengan istilah “*trah wadahe cilik*” (keturunan dengan penghasilan kecil). Dari sisi budaya, mereka cenderung menikmati kemiskinannya itu, sehingga muncul ungkapan “*luwih becik mikul dawet kanthi rengeng-rengeng, tinimbang numpak Mercy nanging mbrebes mili*” (lebih baik membawa minuman cendol sambil berdendang daripada naik mobil Mercy tapi sambil menangis). Dengan justifikasi keagamaan kalangan abangan di Jawa menyatakan dengan istilah “*donya kuwi nerakane wong Islam, surgane wong kafir*” (dunia itu nerakanya orang islam, surganya orang kafir), sebuah ungkapan yang tak lebih sebagai penghibur diri dan wujud kepasrahan atas kekalahan (fatalistik).

Karakteristik budaya kemiskinan seperti di atas yang lebih cenderung pada sikap pasrah dan kurang produktif ini tidak sejalan dengan karakter manusia modern. Alex Inkeles dan

David Smith dalam *Becoming Modern*, menggambarkan ciri-ciri manusia modern yaitu terbuka terhadap pengalaman dan ide baru, punya kesanggupan merencanakan, percaya bahwa manusia bisa menguasai alam mengutamakan kerja keras, memiliki dorongan untuk maju, mengejar pencapaian prestasi, dan berorientasi pada masa sekarang dan juga masa depan (Inkeles dan Smith, 1974). Inkeles menemukan bahwa pendidikan tiga kali lebih kuat untuk mengubah manusia dibandingkan yang lainnya. Karakter-karakter tersebut mempertegas kesimpulan bahwa faktor internal yakni mentalitas orang miskin turut memiliki andil sangat penting dalam masalah kemiskinan sebanding dengan faktor eksternal atau masalah struktural.

Pemahaman keagamaan yang cenderung “pasrah pada takdir” ini tentu berbeda dengan upaya peningkatan taraf hidup melalui pelipatgandaan keuntungan yang menjadi tujuan utama kapitalisme. Perkembangan kapitalisme didorong oleh pemahaman agama yaitu ajaran Protestan di Eropa. Dalam karya fenomenalnya “*The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism*”, Max Weber menunjukkan dengan baik keterkaitan doktrin agama dengan semangat kapitalisme (Weber, 1958). Etika Protestan memunculkan ajaran yang menyatakan seseorang pada intinya sudah ditakdirkan untuk masuk surga atau neraka. Untuk mengetahui apakah ia masuk surga atau neraka dapat diukur melalui keberhasilan kerjanya di dunia. Jika seseorang berhasil dalam kerjanya (sukses) maka hampir dapat dipastikan bahwa ia ditakdirkan menjadi penghuni surga, namun jika sebaliknya kalau di dunia ini selalu mengalami kegagalan maka dapat diperkirakan seorang itu ditakdirkan untuk masuk neraka. Pemaknaan atas ajaran Protestan ini terwujud dalam etos kerja untuk memperoleh kesejahteraan dengan memajukan industri yang berbasis kapitalisme pada masyarakat Barat. Hal inilah yang diakui

sebagai pendorong berkembang pesatnya kapitalisme modern.

Pemahaman nilai keagamaan semacam ini tentunya punya pengaruh positif mendorong kemajuan atau dengan kata lain mendorong masyarakat untuk menjadi tidak miskin. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia perlu menemukan nilai-nilai dasar di dalamnya seperti contoh ungkapan “*beribadahlah seperti engkau akan mati esok hari, namun bekerjalah seperti engkau akan hidup selamanya*”.

Budaya Kemiskinan dan Tantangan Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Penyebab kemiskinan di Indonesia tidak bisa hanya dilihat dari satu faktor saja, akan tetapi harus mempertimbangkan berbagai segi (multi dimensional). Baik faktor struktural maupun kultural punya kontribusi yang hampir seimbang. Kemiskinan di Indonesia terlihat dengan adanya budaya miskin yang seolah terpelihara dalam masyarakat, seperti kurangnya semangat untuk memperbesar penghasilan, sekalipun hal ini pastilah masih bisa diperdebatkan. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia belum mampu membuat seluruh lapisan masyarakat terlibat secara setara dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Salah satu akibatnya penduduk miskin kesulitan mengakses sumber-sumber modal untuk dapat memperbesar pendapatan.

Mengatasi hambatan struktural selama ini lebih dominan menjadi *concern* para penyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bagaimana pemangku kebijakan hendaknya menyusun program anti kemiskinan, digambarkan dengan baik oleh Edi Suharto. Suharto (2005) memberikan pandangan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dianalogikan dengan ikan dan kail. Banyak pihak mengatakan bahwa memberi ikan kepada orang miskin tidak dapat menyelesaikan masalah karena hanya

akan menjadikan ketergantungan bagi orang miskin itu. Kemudian, banyak orang percaya memberi kail akan lebih baik karena menimbulkan jiwa kemandirian. Analogi ini perlu diperluas, bahwa memberi kail saja ternyata tidak cukup dan harus diikuti dengan kemampuan untuk memperoleh ikan itu. Pendidikan, dalam hal ini pemberian keterampilan (*capacity building*), kemudian menjadi kata kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. Suharto melanjutkan, setelah orang punya kail dan memiliki ketrampilan mengail, tidak dengan serta merta ia dapat mengumpulkan ikan, jikalau lautan, sungai dan kolam dikuasai kelompok “elit”. Harus dipastikan bahwa kolam yang terdapat ikan di dalamnya itu masih ada dan bisa diakses secara adil. Karenanya, penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan struktural dan makro kelembagaan.

Lebih lanjut penanggulangan kemiskinan harus menyentuh pula pada perubahan struktur ekonomi yang diharapkan lebih berpihak pada rakyat kecil, mendukung produktivitas dan mendekatkan pada akses pemasaran. Salah satu ide yang dikedepankan adalah bagaimana membuka sebanyak mungkin akses modal untuk menggerakkan ekonomi pengusaha kecil melalui kredit mikro (*microfinance*). *Microfinance* diposisikan sebagai sebuah sarana penanggulangan kemiskinan yang kental dengan nuansa ‘sosial-ekonomi’ dan *market friendly*. *Microfinance* diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan pada sisi yang lain terdapat lonjakan pengetahuan, ketrampilan dan modal sosial dari para anggotanya (Aryo, 2012). *Microfinance* dimaksudkan untuk merubah “lingkaran setan” kemiskinan “*low income, no savings, no investment, lower income*”, menjadi spiral kesejahteraan yaitu “*an expanding system of low income, access to credit, investment, higher income, small savings, and still more credit lending to even higher income*”

(Mohiuddin, 2005; Kasim, 2005; Yunus 1998, dalam Aryo, 2012).

Strategi struktural sebagaimana dicontohkan diatas, perlu diimbangi dengan strategi berbasis kultural (budaya). Strategi pengentasan kemiskinan dengan mengatasi hambatan budaya memberi peluang keterlibatan masyarakat awam dalam ikut serta menyusun strategi-strategi kebudayaan dengan memaknai ulang nilai-nilai budaya yang telah dan masih eksis di masyarakat. Budaya yang berkembang harus mampu menjadi semangat kolektif dengan melakukan reproduksi atas modal sosial yang menjadi kekayaan kultural masyarakat.

Kajian untuk menemukenali nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia telah banyak dilakukan. Salah satunya dilakukan Mochtar Lubis (2012). Pada pidatonya tahun 1977, Lubis mengemukakan karakter dasar masyarakat Indonesia dilihat dari sisi budaya, ditandai dengan beberapa ciri-cirinya yaitu: (1) *Hipokrit atau munafik*. Berpura-pura, lain di muka, lain di belakang. Hal ini dikarenakan adanya kekuatan-kekuatan dari luar yang memaksa menyembunyikan apa yang sesungguhnya dirasakan atau dipikirkan. Sebab, jika berterus terang, takut dikenai sanksi atau dianggap membawa bencana. (2) *Segan dan enggan bertanggung jawab atas perbuatannya, keputusannya, kelakuannya, pikirannya, dan sebagainya*. Atasan yang bersalah, lebih suka menjawab “bukan saya” sambil melimpahkan kesalahan kepada bawahan, sementara bawahan berdalih “Saya hanya melaksanakan perintah dari atasan”. (3) *Jiwa feodal*. Di masyarakat kita lebih dikenal dengan istilah *asal bapak senang* (ABS). ABS ini melahirkan, “yang berkuasa sangat tidak suka mendengar kritik, dan orang lain amat segan untuk melontarkan kritik terhadap atasan”. (4) *Masih percaya takhayul*. Takhayul direproduksi di era modern dengan istilah-istilah “sakti”, seperti: Nekolim, Vivere Pericoloso, Berdikari, Tritura, Ampera, Orde

Baru, *the rule of law*, insan pembangunan, dan sebagainya. Tidak jarang konsep dan istilah tertentu sengaja diciptakan penguasa tanpa operasionalisasi yang jelas sehingga cenderung sekedar jargon kosong. (5) *Manusia Indonesia itu artistik*. Ciri ini menjadi yang paling menarik dan mempesonakan serta merupakan sumber dan tumpuan harapan bagi hari depan manusia Indonesia. (6) *Manusia Indonesia memiliki karakter yang lemah*. Ciri ini masih dapat kita temui sampai sekarang. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan dan memperjuangkan keyakinannya. Karenanya di kalangan terpelajar muncul istilah “pelacuran intelektual”.

Karakter negatif manusia Indonesia yang hipokrit menurut Mochtar Lubis tersebut, relevan dengan respon sebagian masyarakat atas program-program bantuan sosial pemerintah seperti temuan Sugeng Harianto pada bagian sebelumnya. Saat-saat tertentu menjelang bantuan akan digulirkan, sering ditandai dengan munculnya fenomena “naiknya” angka kemiskinan. Pendataan penerima bantuan selain menambah penerima baru juga melanjutkan penerima sebelumnya dan hampir bisa dipastikan jumlah penerima akan bertambah. Menjadi sulit bagi pemerintah untuk mengurangi jumlah penerima bantuan karena sebetulnya ada sebagian masyarakat itu tidak lagi berhak menerima bantuan. Padahal, paradigma pemberian bantuan untuk memberdayakan masyarakat miskin seharusnya hanyalah stimulus agar tumbuh kemampuan untuk menanggung beban hidup mereka sendiri. Lebih memprihatinkan lagi manakala penambahan jumlah penerima bantuan dianggap menjadi salah satu “prestasi” aparat pemerintah setempat untuk kepentingan politik sesaat.

Fenomena semacam ini semestinya tidak perlu terjadi jika masyarakat menjauhkan diri dari sikap hipokrit atau munafik yang jelas-jelas jauh dari nilai-nilai keadilan. Pada satu sisi

masyarakat harus dibudayakan untuk bersikap jujur sehingga pemerintah dapat mengukur pencapaian program-program anti-kemiskinan secara akurat. Sementara pada sisi lain para teknokrat diharapkan berani mengambil sikap tegas atas kualitas pencapaian dengan menjunjung tinggi kaidah-kaidah keilmuan sehingga tidak sekedar mengafirmasi keberlangsungan program-program tersebut dengan dalih perluasan akses untuk masyarakat miskin.

Meskipun demikian selain ciri-ciri di atas, Mochtar Lubis menyampaikan juga beberapa kelebihan manusia Indonesia yang bisa dijadikan sebagai modal utama bagi kemajuan bangsa ini, antara lain: kasih bapak kepada anak-anaknya (paternalistik), pada dasarnya berhati lembut dan suka damai; punya selera humor yang cukup baik; cepat belajar dan otaknya cukup encer. Sifat-sifat itu, menurutnya bisa menjadi modal manusia Indonesia untuk berkembang.

Kajian lain terhadap pengaruh nilai-nilai budaya terhadap kemiskinan diantaranya dilakukan oleh antropolog terkemuka Indonesia, Koentjaraningrat. Ia menyebut beberapa budaya kemiskinan sebagai mentalitas yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, seperti masyarakat yang pasrah dengan keadaannya (*nrimo ing pandum*) dan menganggap bahwa mereka miskin karena faktor keturunan, yang tidak bisa diubah (takdir). Beberapa mentalitas dominan bangsa Indonesia menurut Koentjaraningrat, yaitu: (1) Meremehkan waktu; (2) Suka menerabas; (3) Tidak percaya diri; (4) Tidak disiplin; (5) Suka mengorbankan tanggung jawab (Koentjaraningrat, 1983).

Beberapa karakter nilai budaya yang diungkapkan para ilmuwan sosial tersebut perlu dimaknai ulang dalam era modern sekarang ini. Mengatasi budaya yang dominan itu, perlu

diciptakan “budaya tanding”, yaitu memunculkan sebagian dari populasi suatu masyarakat yang secara kuat menganut atau memeluk satu atau lebih nilai-nilai budaya yang berbeda dengan nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan yang dominan (Sujono, 2013). Budaya tanding dalam konteks nilai-nilai budaya kemiskinan, bisa dimunculkan beberapa di antaranya: (1) Budaya hipokrit dilawan dengan budaya jujur dan lugas; (2) Budaya feodal dilawan dengan budaya egaliter; (3) Budaya meremehkan waktu dilawan dengan budaya menghargai waktu (*time is money*); (4) Budaya suka menerabas dilawan dengan budaya antri; (5) Budaya ceroboh dilawan dengan budaya disiplin. Beberapa nilai budaya ini bisa menjadi bekal awal pemahaman akan potensi nilai-nilai budaya yang lebih progresif mendorong kemajuan.

Setelah satu generasi berlalu sejak Mochtar Lubis menyampaikan pidatonya di 1977 itu, ciri-ciri manusia Indonesia masih sama bahkan berkembang dalam format lain. Kejujuran merupakan hal yang langka dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia yang hipokrit, padahal salah satu nilai utama profetik adalah kejujuran (Ekawati dan Katrini, 2018). Kesimpulan ini menjadi menjadi satu keprihatinan di tengah upaya kita melakukan perubahan perilaku kearah kemajuan.

Upaya penanggulangan kemiskinan lebih bernilai strategis dengan melibatkan keluarga miskin dan komunitasnya untuk secara mandiri mengatasi masalah berangkat dari potensi wilayah dan budaya lokal yang mereka miliki. Pemaknaan ulang atas nilai-nilai budaya dalam masyarakat bisa dimulai dari identifikasi atas potensi lokal yang selaras dengan semangat pemberdayaan masyarakat. Input dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya. Proses ini dilakukan melalui

dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks potensi wilayah dan budaya lokal masyarakat setempat.

Maka dalam hal ini, pihak dari luar diri masyarakat miskin diletakkan pada posisi fasilitator pemberdayaan, bukan lagi aktor utama pengusung program yang bersifat *top-down*. Masyarakat miskin perlu diberi kesempatan lebih luas dan bahkan didorong untuk mengorganisasi diri agar bisa menemukannya potensi diri dan kemudian menyusun rencana aksi untuk pemberdayaan diri mereka sendiri.

Perlunya kesadaran berorganisasi ini sejalan dengan saran Lewis bahwa untuk menghilangkan budaya kemiskinan orang-orang miskin perlu bersatu dalam suatu organisasi. Lewis (1966) menulis dalam buku *The Study of Slum Culture - Backgrounds for La Vida* seperti berikut:

“Any movement - be it religious, pacifist, or revolutionary - that organizes and gives hope to the poor and effectively promotes solidarity and a sense of identification with larger groups, destroys the psychological and social core of the culture of poverty”.

(Setiap gerakan baik itu gerakan bersifat religius, pasifis, ataupun revolusioner yang mengorganisasikan dan memberikan harapan bagi si miskin dan secara efektif mempromosikan solidaritas dan perasaan identitas yang sama dengan kelompok masyarakat yang lebih luas, akan menghancurkan (masalah) psikologis dan sosial utama (yang merupakan ciri) dari budaya kemiskinan).

PENUTUP

Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia muncul mengiringi kompleksitas perkembangan struktur masyarakat kita. Kebijakan penanggulangan kemiskinan selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan orang miskin, harus pula menyertakan nilai-nilai

budaya menjadi modal dasar semangat pengentasan kemiskinan itu sendiri. Tantangan utamanya adalah bagaimana membuat masyarakat bisa menyadari bahwa mereka miskin karena sebab-sebab budaya yang mempengaruhi pola pikir dan menghambat kemajuan (adanya kemiskinan kultural). Perilaku yang tidak produktif bisa dikaitkan dengan adanya perilaku boros, atau perilaku mengedepankan gengsi dalam masyarakat. Ritual-ritual adat yang berlebihan dan memerlukan biaya besar misalnya, bisa menjadi titik masuk untuk dimaknai ulang menjadi budaya positif yang mendorong kemajuan. Di sinilah dituntut peran lebih besar para pemuka agama dan tokoh-tokoh adat untuk memaknai ulang pemahaman masyarakat atas nilai-nilai dasar itu.

Menyimpulkan dari pemaparan di atas, ada beberapa sifat-sifat manusia Indonesia yang berkembang menjadi nilai-nilai budaya kemiskinan dalam masyarakat yang masih berlangsung hingga sekarang dengan segala modifikasinya. Sifat hipokrit terlihat dari sebagian masyarakat kita yang sangat pragmatis, di mana mereka memilih “menjadi miskin” agar bisa menerima program bantuan sosial dengan dalih ikut menikmati “uang negara”. Kebiasaan suka menerabas mengambil jalan pintas mewujud dalam penggunaan jalur tidak resmi pada birokrasi layanan publik yang berkembang menjadi perilaku koruptif dalam berbagai segi kehidupan. Warisan nilai feodal “asal bapak senang” membuat pelaksanaan program-program pemerintah tidak mencapai hasil optimal sesuai harapan. Lemahnya dorongan berkompetisi (*nrimo*) untuk melakukan ekspansi usaha menjadi salah satu sebab kurangnya keberhasilan program-program pemberdayaan ekonomi. Hal-hal tersebut menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan saran untuk dapat ditindaklanjuti dalam kajian-kajian berikutnya. Pemaknaan ulang atas nilai-nilai budaya yang telah eksis dan upaya memunculkan budaya baru yang sesuai semangat zaman perlu menjadi kajian lebih lanjut para ilmuwan sosial. Penelitian tentang budaya kemiskinan di Indonesia bisa bertolak dari konsep Oscar Lewis untuk melihat sejauh mana budaya menjadi faktor penghambat atau sebaliknya pendorong kemajuan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin kompleks dengan pola industrialisasi kapitalistik menemukan relevansinya dengan kondisi masyarakat di Amerika Latin, tempat di mana teori ini bermula. Karakter khas masyarakat Indonesia memberikan warna tersendiri sehingga pemahaman akan budaya kemiskinan akan mengalami penyempurnaan secara empiris.

Upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya lebih memperhitungkan potensi wilayah dan budaya lokal sehingga meminimalkan resistensi terhadap nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Penulis mengajukan satu rumusan dasar pelibatan beberapa potensi masyarakat yang di antaranya bisa dimulai dengan: pertama, meningkatkan kapasitas institusi agama dan adat untuk berperan aktif dalam menemukenali nilai-nilai budaya yang mendorong kemajuan; kedua, menata kembali sistem sosial dan budaya masyarakat, dan merevitalisasi sistem nilai lokal yang memungkinkan diadopsi dalam program-program penanggulangan kemiskinan; ketiga, memberi kesempatan lebih luas bahkan mendorong orang-orang miskin mengorganisasi diri agar mampu mengenali potensi kulturalnya untuk mengentaskan diri dari kemiskinan; keempat, menjadikan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari gerakan kultural melalui institusi-institusi lokal yang telah eksis; kelima, menyeimbangkan antara pendekatan kultural dengan pendekatan ekonomi dalam

desain program-program penanggulangan kemiskinan untuk memberikan penghargaan lebih pada nilai-nilai kemanusiaan.

Patut diakui, menghilangkan kemiskinan fisik semata tidaklah cukup jika tidak diiringi perubahan *mindset* tentang nilai-nilai budaya yang cenderung melanggengkan kemiskinan. Pada sisi lain, tindakan-tindakan yang bersifat struktural perlu terus didorong agar penguasaan atas sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi lainnya lebih merata. Peningkatan taraf hidup si miskin diarahkan agar mereka “naik kelas” ke dalam golongan masyarakat kelas menengah dengan kemampuan untuk mandiri, berpikiran maju dan lepas dari hambatan-hambatan kultural yang menghambat kemajuan. Tidak kalah penting upaya terstruktur perlu ditingkatkan untuk mengorganisasi dan memberdayakan kaum miskin agar membuat mereka mempunyai perasaan bahwa mereka memiliki kekuatan dan kepemimpinan untuk lepas dari belenggu kemiskinan, karena pada hakekatnya “Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa sebelum bangsa itu mengubah nasibnya sendiri”.

DAFTAR PUSTAKA

- Alborno, M.A. et al. (2007). *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*. Bogor: Cifor
- Alisjahbana, A.S. & Murniningtyas, E. (2018). *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press
- Aryo, B. (2012). *Is it the Magic Bullet? Micro-finance untuk Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Makalah Seminar
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019, Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>. Diakses 20 Agustus 2020
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>. Diakses 22 September 2020.
- BPS dan UNICEF. (2009). *Membumikan Millennium Development Goals (MDGs) di Searter Nusantera*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Ekawati, M. & Katrini Y.E. 2018. *Merefleksi Sifat Manusia Indonesia Menurut Mohctar Lubis Pada Era Revolusi Industry 4.0*. Pertemuan Ilmiah Bahasa dan Sastra Indonesia (PIBSI) XL ekonomi.bisnis.com. (2020). *Penurunan Angka Kemiskinan Belum Pantas Dibanggakan*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200116/9/1190803/penurunan-angka-kemiskinan-belum-pantas-dibanggakan>. Diakses 22 September 2020.
- Hariato, S. (2015). *Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Bali: Makalah Seminar Nasional Riset Inovatif (SENARI) III.
- Huraerah, A. (2005). *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Paradigma Polistaat Universitas Pasundan Bandung. Vol. 6 No. 2 Tahun 2005.
- Inkeles, A. & Smith. D.H. (1974). *Becoming Modern*. Cambridge: Harvard University Press.
- Joesoef, D. (1996). *Era Kebudayaan: Pemberdayaan Manusia dalam Perkembangan Zaman*. Tulisan dalam buku *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Onny S, Prijono, et

- all. Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Kaplan, D. & Manners, A.A. (2012). *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koentjaraningrat. 1983. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia
- Kuntjoro Jakti, D. (1986). *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lewis, O. (1959). *Five Families; Mexican Case Studies in the Culture of Poverty*. (alih bahasa: Lewis, Oscar. 2016. *Kisah Lima Keluarga; Telaah-Telaah Kasus Orang Meksiko dalam Kebudayaan Kemiskinan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lewis, O. (1959). *A Study of Slum Culture: Backgrounds for La Vida*. New York: Random House
- Lubis, M. (2012). *Manusia Indonesia (sebuah pertanggung jawaban jawab)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mubyarto. (1995). *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media
- Mubyarto. (1996). *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Prawoto, N. (2009). *Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Vol. 9 No. 01 Tahun 2009.
- Royat, S. (2007). *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional: Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal 21 Agustus 2007 di Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York : Alfred Knof.
- Sujono, M. Herdyanto. (2013). *Budaya Tanding dan Orang Muda*.
<https://www.kompasiana.com/dendisujono/552bfa006ea83441098b4578/budaya-tanding-dan-orang-muda>
Diakses 11 September 2020.
- Suharto, E. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Konsep Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Agenda Strategi DEPSOS RI
- Sumodiningrat, G, Santoso, B., Maiwan, M. (1999). *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: IMPAC.
- Suparlan, Parsudi. et al. (1984). *Kemiskinan di Perkotaan, Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sutrisno, M. dan Putranto, H. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Malang: Penerbit Intrans Publishing.
- Syawie, M. (2011). *Kemiskinan dan Kesenjangan*, Jurnal Informasi Kementerian Sosial. Vol. 16 No. 03 Tahun 2011.
- Sutikno, S., Soejono, E., Rumiati, A. (2015). *Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Sistem*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 11 No.3 Tahun 2015

- Thohir, M. (2005). *Makalah Advokasi Anggaran yang Pro Poor*. Semarang
- ul Haq, M. (1976). *Poverty Curtain*. (alih bahasa: ul Haq, Mahbub. 1983. *Tirai Kemiskinan, Tantangan Pembangunan untuk Dunia Ketiga*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Weber, M. (1958). *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Wahyudi, S.F. & Handoyo, P. (2014). *Budaya Kemiskinan Masyarakat Pemulung*. Jurnal Paradigma. Volume 02 Nomor 02 Tahun 2014
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.